



Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo

Nurul Aldha Mauliddina Siregar ^{(a)*}, Arief Purbantara ^(a)

^(a) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta

* Korespondensi Penulis, Alamat: Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta, Indonesia, Email: nurul.aldha@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submitted 23 Januari 2020

Revised 11 Maret 2020

Accepted 14 Mei 2020

Keywords:

People with Disabilities, Empowerment Strategy, Stigma of Discrimination, Desa Panggunharjo.

ABSTRACT

This article is an analysis of the powerless stigma of people with disabilities that still occurs in social life. The study was conducted to find out the process and method specifically carried out by the village government of Panggunharjo in initiating the presence of an environment that is inclusive of persons with disabilities. The study was conducted qualitatively through in-depth interview techniques, observation, and secondary data collection. As a result of the research shows that the village government of Panggunharjo can be changing the stigma of discrimination for people with disabilities more meaningful in their life. This acts as an empowerment strategy that can people with disabilities not only an object but also a subject of development programs. The people with disabilities were given the role of advancing village in the concern of artistic and cultural programs. The role creates people with disabilities to able independently in social life and accepted by village people. Therefore, the debate continues with the viewpoint of society that is the persons with disabilities identically stigma on an inability to work. This condition brings to the trouble of reaching their economic independence. Moreover, for the local community in rural areas, persons with disabilities are still often regarded as cursed creatures or carriers of disasters in the family which causes them to experience psychological disorders and difficulties in socializing. Hence, a draw of discrimination fend stigma it's needs of the strategy steps by the government village on sustainability.



ABSTRAK

Artikel ini menganalisis stigma ketidakberdayaan penyandang disabilitas yang masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui proses serta cara yang secara spesifik dilakukan pemerintah Desa Panggungharjo dalam menginisiasi hadirnya lingkungan yang inklusif bagi difabel. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo mampu mengubah stigma diskriminatif bagi penyandang disabilitas kepada tindakan yang lebih bermakna. Tindakan ini sebagai strategi pemberdayaan untuk menjadikan penyandang disabilitas tak lagi sebagai obyek melainkan subyek pembangunan. Masyarakat penyandang disabilitas diberikan peran dalam memajukan desa dengan terlibat dalam program budaya dan kesenian. Peran ini menciptakan masyarakat penyandang disabilitas mampu mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidup dan diterima oleh masyarakat desa. Namun perdebatan masih berlanjut tatkala cara pandang masyarakat yang kerap mengindentikkan penyandang disabilitas dengan ketidakmampuan untuk bekerja. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit mencapai kemandirian secara ekonomi. Terlebih, untuk lingkungan masyarakat pedesaan, penyandang disabilitas masih sering dianggap sebagai kutukan dan aib keluarga. Hal ini menyebabkan mereka mengalami gangguan secara psikologis dan kesulitan untuk bersosialisasi. Untuk itu, tawaran menarik untuk menepis stigma diskriminatif tersebut membutuhkan langkah strategis pemerintah desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci:
Peyandang
Disabilitas; Strategi
Pemberdayaan;
Stigma
Diskriminatif; Desa
Panggungharjo.

Pendahuluan

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum dan kesempatan Desa untuk berbenah sehingga dapat menghadirkan ruang lingkup yang inklusif bagi masyarakat. Peralihan konsep pendekatan otonomi kebijakan yang memberikan

kewenangan penuh kepada pemerintah desa atas wilayahnya telah menimbulkan dorongan perubahan. Kewenangan yang berubah telah menjadikan desa lebih leluasa untuk memperbaiki sistem internal pemerintahan. Apalagi desa memiliki modal sosial, pranata sistem sosial yang terwariskan, dan ada kehendak serius untuk membangun kehidupan bersama secara lebih baik. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah desa menyadari kondisi yang terwariskan tersebut terinternalisasi ke dalam program pembangunan (*endogenous development*).¹

Desa, saat ini, tak hanya terekognisi sebagai simbol kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, melainkan berperan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih leluasa. Keleluasaan cakupan pemerintahan ini dapat mendorong desa lebih mandiri dalam memenuhi hak atas asal usul dan kemampuan mengurus kepentingan masyarakat pada level berskala lokal, termaksud dalam penanganan kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) di 2018 mendata bahwa 12,29 % atau setara 31,2 juta jiwa penduduk Indonesia dengan usia diatas dua tahun mengalami disabilitas. Proporsi usia lansia menjadi yang terbesar 57,26% menyandang disabilitas, kemudian usia produktif 11,12% dan anak-anak sebesar 4,19 %.²

Hasil survei di 11 Provinsi di Indonesia ditemukan bahwa penyandang disabilitas kondisi cukup memperhatikan ditinjau dari empat aspek; pendidikan, penerimaan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Studi Adioetomo juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mengalami kondisi

¹ Sunaji Zamroni, "Desa Membangun Tanpa Meninggalkan Kelompok Pinggiran," *Institute for Research and Empowerment (IRE)* 2, no. 1 (2016): 1-10.

² BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, ed. Subdirektorat Statistik Rumah Tangga (Jakarta, 2018).

kemiskinan yang lebih buruk dibanding non disabilitas.³ Data Susenas di tahun 2018, ada 11,04% disabilitas hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara ada 15,38% merupakan penyandang disabilitas berat. Sebarannya, ada 47,91 % berada di pedesaan— dengan komposisi; 42,42 % penyandang disabilitas anak-anak, 47,61 penyandang disabilitas usia produktif, dan 50,14 % penyandang disabilitas usia lanjut usia (lansia).⁴

Kondisi lebih ekstrim ketika penyandang disabilitas berada dipedesaan telah mengalami stigma diskriminatif. Bahkan, studi Maftuhin memberikan satu perspektif yang *genuine* dalam kajian literatur tentang penyandang disabilitas. Maftuhin telah menunjukkan ‘perebutan makna’ dan penggunaan kata difabel dengan berbagai istilah peyerotif, baik ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Misalnya, penyandang cacat, idiot, ‘kelainan’, *picek* (Jawa), dan lainnya. Istilah penyerotif inilah yang menyudutkan penyandang disabilitas ke dalam stigma diskriminasi.⁵ Keadaan ini berkembang dalam ruang lingkup masyarakat pedesaan dengan melihat keterbatasan penyandang disabilitas sebagai suatu kekurangan, aib, kutukan, dan hal-hal yang memiliki pengaruh buruk, sehingga bila ada anggota keluarga yang mengalami disabilitas kerap dikekang, dikurung, sampai tidak diakui oleh keluarganya. Bahkan sejumlah penyandang disabilitas psikososial kerap mendapat julukan-julukan yang merendahkan martabat mereka sebagai manusia.⁶ Hal ini senada dengan studi Eny dan Rumiwati, semakin mengecilkan peran penyandang disabilitas

³ Moertiningsih Adioetomo Sri, Mont Daniel, and Irwanto, “Persons With Disabilities Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies,” *Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia in Collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)* (Jakarta, 2014).

⁴ BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.

⁵ Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas,” *Inklusi Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–62, <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.

⁶ Human Right Watch, “Hidup di Neraka” (Chicago, 2016).

dalam bermasyarakat. Kondisi yang ada menyebabkan penyandang disabilitas secara psikis mengalami rasa rendah diri dan kesulitan menyesuaikan diri hingga mengisolasi dirinya sendiri.⁷

Penulis sependapat dengan studi-studi di atas bahwa penyebutan istilah peyerotif kepada penyandang disabilitas dapat menyebabkan mereka berada di garis kemiskinan. Namun tidak sepakat dengan studi Eny dan Rumiati yang menyudutkan penyandang disabilitas karena dapat mengalami gangguan psikologis dan kesulitan penyesuaian diri apabila terjadi tindakan diskriminatif. Hal ini justru dapat menjadi kekuatan bagi penyandang disabilitas untuk bangkit dari stigma diskriminatif agar dapat berdaya. Pada konteks ini dibutuhkan sebuah upaya serius dari pemerintah untuk melawan stigma negatif penyandang disabilitas.

Keseriusan pemerintah dalam upaya menepis makna diskriminatif kepada penyandang disabilitas terjadi di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Desa Panggungharjo menjadi salah satu desa yang telah menyalurkan dana desa untuk pemberdayaan disabilitas. Pemberdayaan merupakan satu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi ketidakmampuan dalam rangka menjawab masalah sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu syarat terealisasinya keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan adalah berjalannya peran dan fungsi pemerintah sebagai pengayom, pelindung, dan pembimbing masyarakat.⁸

Dengan demikian, tulisan ini menganalisis stigma ketidakberdayaan penyandang disabilitas dan strategi pemerintah Desa Panggungharjo dalam menciptakan lingkungan inklusif sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

⁷ Eny Hikmawati and Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat," *Sosio Informa* 16, no. 01 (2011): 17–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.41>.

⁸ Ferdian Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM di Desa Pompaniki," *Public Administration Journal* 2, no. 1 (2008): 60–66.

Studi ini disusun menggunakan metode kualitatif atau disebut juga sebagai pendekatan naturalistik. Pendekatan ini dilakukan secara alamiah (*natural setting*); atau dengan kata lain menggunakan metode etnografi. Hal ini bermula dari penelitian antropologi.⁹ Sedangkan dikatakan sebagai metode kualitatif sebab data yang disajikan serta yang dianalisis bersifat kualitatif.¹⁰

Kegiatan pengamatan dilaksanakan di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dengan teknik wawancara mendalam dan observasi secara langsung. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*). Informan yang terpilih antara lain pemerintah desa, pengurus BUMDesa, dan Penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo. Sedangkan data skunder dikumpulkan dari data website pemerintah Desa Panggungharjo, studi literatur, dan data pendukung lainnya dari kementerian terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun sumber lainnya.

Mengubah Stigma Diskriminatif Menjadi ‘Berdaya’

Perjalanan kebijakan Indonesia untuk melindungi Hak-Hak disabilitas telah dilaksanakan sejak tahun 1997 melalui UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Namun, perspektif penyandang disabilitas saat itu erat dikaitkan dengan kondisi minimnya kesehatan (berpenyakit) sehingga cenderung menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek untuk dikasihani. Kemudian di tahun 2007, Indonesia menandatangani konvensi PBB terkait hak-hak disabilitas. Di tahun 2011, Pemerintah meratifikasi hasil konvensi PBB menjadi Undang-Undang no. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak penyandang Disabilitas. Terakhir di tahun 2016, UU No.4 Tahun 1997 diubah menjadi UU No 8 Tahun

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2010).

2016 tentang penyandang disabilitas dengan sudut pandang lebih humanis dan mengaplikasikan paradigma HAM sebagai dasarnya.

Program pemberdayaan menjadi salah satu corong solusi dalam membenahi permasalahan penyandang disabilitas. Namun kebanyakan program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas belum serta merta sejalan dengan Undang-Undang. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap disabilitas selama ini cenderung pragmatis, general, hanya menyentuh bagian permukaan masalah, perspektifnya cenderung menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek yang dikasihani yang secara mental justru menyebabkan mereka menjadi ketergantungan.¹¹ Padahal melihat kondisi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas yang spesifik, seyogyanya penanganan penyandang disabilitas dipedesaan dapat dilaksanakan secara khusus dengan strategi tersendiri sesuai potensi desa dan kondisi masing-masing penyandang disabilitas yang ada.

Sejak kebijakan di tingkat desa berlaku maka fasilitasi dana desa serta pendirian lembaga ekonomi lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa diorientasikan untuk pemberdayaan disabilitas. Pada Pasal 7 Permendes no. 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditujukan salah satunya guna membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki sasaran peningkatan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal serta anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Sasaran lainnya, dana desa disalurkan untuk mendukung pengelolaan usaha ekonomi produktif dan permodalan yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau

¹¹ Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang," *Indonesian Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (2014): 27–37. Ulfa Fatmala Thohari, Slamet; Lintang Sari, Alies Poetri; Rahajeng, Urita Werdi; Mahalli; Rizky, "Laporan Penelitian: Pemetaan Kesenian dan Disabilitas di Indonesia," *Pusat Studi Layanan dan Disabilitas Universitas Brawijaya & British Council Indonesia*, 2017, 1–283.

BUM Desa Bersama.

Sejalan dengan itu Penelitian yang dilakukan Smeru menyebut bahwa Desa merupakan lingkungan komunitas terdekat bagi penyandang disabilitas. Sehingga menjadi satu rekomendasi dalam penelitian tersebut untuk menjadikan dana desa sebagai daya dukung potensial guna menghadirkan pemberdayaan penyandang disabilitas, pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, dan penghapusan stigma.¹²

Pemberdayaan masyarakat di Desa Panggungharjo dilaksanakan dengan melibatkan beragam golongan masyarakat dari masyarakat lanjut usia, Ibu hamil, masyarakat PMKS, dan penyandang disabilitas. Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Panggungharjo didanai dari APBDesa. Dana APBDesa bersumber dari Dana Desa dan penghasilan dari sisa hasil usaha Desa berupa kegiatan sewa lahan, sisa hasil usaha BUM Desa dan lainnya. Di tahun 2017, besar dana yang dikucurkan khusus untuk pemberdayaan penyandang disabilitas mencapai Rp 200,- juta diperuntukan untuk kegiatan dan kebutuhan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, buku saku pendamping disabilitas dan lainnya yang menjadi bagian dari Pemberdayaan Disabilitas. Selain itu juga untuk prasarana (infrastruktur) seperti *guiding block*, fasilitas akses disabilitas di kantor desa, balai latihan kerja dan lainnya; lihat website pemerintah Desa Panggungharjo.

Pembangunan sarana ditujukan untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses serta mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat lainnya. Desa Panggungharjo menjadi salah satu desa yang direfrensikan sebagai desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas karena menjadi satu satunya desa inklusif di Indonesia yang memfasilitasi kantor desa nya dengan (infrastruktur)

¹² Hastuti et al., "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas" (Jakarta, 2019), <http://www.smeru.or.id/id/content/kendala-mewujudkan-pembangunan-inklusif-terhadap-penyandang-disabilitas>.

akses disabilitas serta buku panduan layanan pendampingan khusus untuk warga masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga, masyarakat penyandang disabilitas bisa dilayani sesuai kebutuhan dengan tidak mengesampingkan keterbatasan yang mereka miliki.

Jumlah penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo menurut data desa berjumlah 253 orang dari 28.501 jiwa penduduk dengan rincian, penyandang tuna netra sebanyak 17 orang, 38 orang tuna rungu atau wicara, tuna daksa 52 orang, dan tuna grahita sebanyak 124 orang, dan cacat ganda 60 orang.¹³ Penyebab disabilitas disana cukup beragam mulai dari faktor keturunan, kecelakaan, hingga dampak dari bencana alam gempa bumi yang sempat menimpa Yogyakarta dipertengahan Mei 2006. Sehingga beberapa dari penyandang disabilitas disana sebelumnya telah memiliki pekerjaan dan keahlian di bidang tertentu, namun karena tertimpa musibah mereka menjadi penyandang disabilitas.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara partisipatif. Artinya, konsep pemberdayaan melibatkan penyandang disabilitas dalam memetakan kebutuhan mereka (*bottom-up*) namun segala masukan dan program diputuskan secara *top down* oleh kepala desa dengan beragam aspek pertimbangan. Pertimbangan yang utama adalah arah pemberdayaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas sebagai manusia. Pemberdayaan tidak hanya memenuhi dimensi fisik sarana dan prasarana saja namun juga terhadap dimensi mental mereka sebagai seorang warga masyarakat yang membutuhkan aktualisasi diri dan pekerjaan.

Di Desa Panggungharjo, masyarakat disabilitas dilibatkan secara langsung dalam kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes). Bappenas¹⁴ menyebutkan

¹³ Kepala Desa, Wawancara, 17 Desember 2019.

¹⁴ Rianisngsih Djohani, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: FPPM, 2008).

bahwa Musrebangdesa menjadi satu ajang bagi pemangku kepentingan desa untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan dan pengembangan desa guna meningkatkan dan memajukan kinerja desa. Berbagai lapisan masyarakat bekerjasama memikirkan cara guna memajukan desa. Di Desa Panggungharjo, Penyandang Disabilitas menjadi bagian yang selalu dilibatkan dalam Musberangdesa untuk memberikan masukan dan saran terkait program dan pengembangan desa serta melaksanakan pemetaan kebutuhan terkait usulan kebutuhan untuk memfasilitasi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan juga oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Panggung Lestari. BUMDesa Panggung Lestari yang berdiri sejak tahun 2013 berawal dengan unit pengelola sampah yang tergabung dalam kelompok usaha pengelola sampah (KUPAS). Perkembangan unit BUMDesa setiap tahunnya bertambah antara lain UCO (*Used Cooking Oil*), unit agro, pengolahan minyak nyamplung, Kampoeng Matraman, dan Swadesa. Kiprah BUMDesa yang semakin berkembang tak luput karena adanya dukungan dana desa untuk operasional BUMDesa. Setidaknya di awal pemberian dana desa, tahun 2015, BUMDesa Panggung Lestari telah mampu mempekerjakan karyawan yang berasal dari warga lokal sebanyak 20 orang dengan gaji di atas upah minimum regional yang berlaku.¹⁵ Karyawan yang dipekerjakan dalam unit kerja BUMDesa menyertakan warga berkebutuhan khusus. Penyandang disabilitas yang dilibatkan berkategori penyandang disabilitas ringan dengan tipe pekerjaan yang sifatnya teknis seperti menjadi pramusaji dan tukang sampah.

Tahun 2017, BUMDesa Panggung Lestari menambah unit usahanya Kampoeng Matraman, berupa jasa wisata yang

¹⁵ Kepala Desa, Wawancara, 10 Desember 2019.

menawarkan edukasi dan kuliner dengan konsep budaya jawa yang mencitrakan Desa Panggunharjo sebagai Desa Wisata. Layanan akomodasi berupa penginapan, dan sarana pertemuan menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan juga. Dalam operasional Kampong Matraman, diselenggarakan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan Penyandang Disabilitas. Bentuk program pemberdayaan yang dilakukan BUMDesa Panggung Lestari adalah kolaborasi warga dengan kelompok komunitas penyandang disabilitas yang telah berdiri Difcom (*Difable and friends Community*). Komunitas penyandang disabilitas dibangun ruang khusus untuk berorganisasi berupa fasilitas sanggar guna membentuk kegiatan komunitas yang mampu mereka lakukan seperti pertunjukan seni seperti teater, musik, tari, musik *band*, ataupun sebagai tempat untuk memamerkan hasil karya seperti lukisan atau ukiran mereka. Hadirnya fasilitas ini mendorong mereka berperan aktif berkumpul serta berorganisasi hingga secara langsung dan tidak langsung terlibat aktif menjalankan fungsi-fungsi organisasi mulai dari merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi, sampai mengevaluasi dalam kegiatan yang melibatkan partisipasi mereka. Keterlibatan masyarakat difabel terjadi tak lepas dari adanya keterlibatan para tokoh kunci (*local champion*) dari masyarakat dan masyarakat disabilitas itu sendiri.

Kepala desa di Desa Panggunharjo menjadi tokoh kunci (*Local Champion*) yang berperan mendorong hadirnya pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Kepala Desa sebagai pemimpin tata kelola desa tak hanya berperan memfasilitasi masyarakat disabilitas untuk menghadapi masalah yang ada dalam komunitas mereka dengan memberikan fasilitas ruang sanggar untuk komunitas disabilitas berkumpul dan berdiskusi. Namun juga Kepala Desa menjadi inisiator untuk memberikan rekomendasi kepada BUMDesa untuk memperkejarakan penyandang disabilitas.

Kepala desa sebagai pemimpin lokal secara tidak langsung mendorong hadirnya *local champion* baru terutama dalam ruang lingkup masyarakat disabilitas. Bila dikaitkan dengan tiga pembagian peran *local champion* seperti pernyataan yang disampaikan oleh Haven-Tang Joes¹⁶ dan Xu¹⁷, maka kepala desa telah menunjukkan perannya sebagai fasilitator, mediator dan juga mobilisator. Kepala Desa Panggungharjo mencontohkan praktik menggerakkan masyarakat dengan pengembangan modal sosial berupa pendekatan kolektif, kesadaran kolektif, dan aksi kolektif untuk mencapai tujuan kolektif. Faktor kepemimpinan menjadi yang utama dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat bagi penyandang disabilitas.

Bila peran *local champion* dibagi menjadi tiga pembagian fasilitator, mediator, dan mobilisator sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Haven-Tang dan Xu, maka *local champion* penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo menduduki peran sebagai mediator dan mobilisator. Peran mediator ditunjukkan dengan terbentuknya komunitas Difcom yang diprakarsai oleh penyandang disabilitas. Selain itu, *local champion* yang ada tengah menjadi 'media' untuk mempertemukan masyarakat disabilitas dengan pihak-pihak yang mampu memberdayakan mereka seperti pemerintah desa dan pengurus BUMDesa. Selain sebagai mediator, peran yang dominan dilakukan oleh *local champion* di desa antara lain menjadi mobilisator. Peran ini berarti inisiatif memberdayakan perubahan terhadap disabilitas berasal dari disabilitas itu sendiri. Peran *local champion* berfungsi membuat gerakan (*social movement*) untuk secara kolektif melakukan bekerjasama memberdayakan diri

¹⁶ Claire Haven-Tang and Eleri Jones, "Local Leadership for Rural Tourism Development: A Case Study of Adventa, Monmouthshire, UK," *Tourism Management Perspectives* 4 (2012): 28-35, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.04.006>.

¹⁷ Keshuai Xu, Jin Zhang, and Fengjun Tian, "Community Leadership in Rural Tourism Development: A Tale of Two Ancient Chinese Villages," *Sustainability (Switzerland)* 9, no. 12 (2017): 2344, <https://doi.org/10.3390/su9122344>.

mereka sendiri. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Smeru¹⁸, salah satu rekomendasi yang dicantumkan dalam penelitian bahwa untuk menciptakan desa inklusi disabilitas membutuhkan *local champion* (SDM Penggerak di desa). Membina *local champion* menjadi satu alternatif untuk meningkatkan pembangunan inklusif yang strategis.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan BUM Desa Panggung Lestari tidak hanya berada di hilir program pemberdayaan dilibatkan sebagai karyawan, namun menyeluruh mulai dari hulu juga. Berbeda dengan pola pemberdayaan pada umumnya yang menjadikan penyandang disabilitas sebatas objek pemberdayaan. Mereka cenderung dijadikan sekadar penerima bantuan atau manfaat. BUM Desa Panggung Lestari menjadikan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai penerima manfaat namun juga diposisikan sebagai perencana dan pengelola manfaat dengan adanya kesempatan untuk merencanakan kegiatan, berkarya dan bekerja dalam tata kelola organisasi untuk mengembangkan unit usaha.

Diana Conyers merumuskan ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat bersifat penting dalam satu upaya pemberdayaan masyarakat. Pertama, syarat keberhasilan proyek-proyek pembangunan karena partisipasi masyarakat adalah suatu alat untuk meraih informasi terkait kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Kedua, bahwa adanya rasa kepercayaan lebih tinggi terhadap pembangunan oleh pemerintah jika masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya sebab akan menimbulkan rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Di negara berkembang, menunjukkan bahwa bantuan masyarakat akan sulit diharapkan apabila mereka tidak diikutsertakan dalam kegiatan.

¹⁸ Hastuti et al., "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas."

Ketiga, partisipasi penting dilaksanakan karena timbul anggapan bahwa hak dapat diwujudkan jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.¹⁹

Bagi penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo, kegiatan pemberdayaan memberikan dua keuntungan berupa profit dan benefit. Mereka meraih keuntungan ekonomi dari upah bekerja sebagai seniman. Walaupun beberapa dari mereka mengakui bahwa upah yang diterima belum mencukupi untuk meningkatkan status ekonomi. Namun mereka anggap cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan benefit yang mereka rasakan ialah penerimaan masyarakat terhadap kehadirannya sebagai bagian yang dilibatkan untuk meningkatkan potensi Desa Panggungharjo. Sebelum mereka dilibatkan dalam kegiatan desa—dilibatkan dalam BUM Desa, ataupun melakukan pertunjukan seni kondisi penyandang disabilitas di desa Panggungharjo sebagaimana fenomena penyandang disabilitas pada umumnya—mereka kerap mengalami diskriminasi dari masyarakat. Bahkan mereka kerap mendapatkan julukan-julukan yang tidak pantas. Kondisi berangsur berubah sejak didirikannya sanggar .

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Purinami²⁰ bahwa Penyandang Disabilitas bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, melainkan mereka bekerja untuk meningkatkan keterampilan sosial dalam bermasyarakat. Bekerja memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas terjun sepenuhnya sebagai masyarakat dalam ruang lingkup sosial serta meningkatkan jaringan sosial, keterampilan sosial, kemandirian serta peran sosial lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas bekerja juga untuk meraih kebutuhan akan penghargaan

¹⁹ Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga* (UGM Press, 1991).

²⁰ Geminastiti Purinami, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana, "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 234, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>.

dan pengakuan sebagai bentuk dari eksistensi diri.

Konteks pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Panggungharjo sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang hakikatnya mengarah pada satu upaya menciptakan iklim (lingkungan) yang menciptakan suatu potensi dari masyarakat agar berkembang (*enabling*). Hal tersebut didasari oleh logika, yaitu sebenarnya tak ada satu pun kelompok masyarakat yang tidak memiliki daya sama sekali, namun terkadang mereka tidak menyadari atau secara eksplisit daya tersebut tidak diketahui.²¹ Oleh sebab itu, konsep utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah hidup dalam kelompok atau komunitasnya (mandiri).²²

Model pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Panggungharjo menyebabkan “*peningkatan kemandirian bagi diri kami dengan adanya kesempatan berkarya dan berprestasi sebagai seniman*”²³. Pemberdayaan yang menempatkan posisi penyandang disabilitas sebagai subyek pemberdayaan secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi mereka untuk menampilkan jati diri agar dikenali secara utuh dengan segala keterbatasan dan potensi dirinya. Kondisi ini bukan hanya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada tapi masyarakat pun beradaptasi dengan keterbatasan para penyandang disabilitas.

Kesempatan aktualisasi diri yang dilakukan para penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan yang dijalankan BUMDesa Panggungharjo memberikan pengaruh besar dalam

²¹ Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat* (Yogyakarta: Aditya Media, 1998); Tri Winarni, *Tantangan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015).

²² Hempri Suyatno and Suparjan, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000).

²³ Buthong, Wawancara, 17 Desember 2019.

pergeseran stigma masyarakat di Desa Panggungharjo. Masyarakat Desa Panggungharjo menerima kehadiran penyandang disabilitas layaknya masyarakat lainya—tidak membedakan, dilibatkan dalam kegiatan desa seperti kerja bakti, musyawarah, dan lainnya. Di beberapa sekolah dasar, mereka sering dijadikan guru untuk membina ekstra kurikuler seni dan budaya. Hal ini jauh berbeda sebelum disabilitas dilibatkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan ataupun kegiatan lainnya di desa. Dahulu para penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo kerap mengalami intimidasi, pelecehan, ditakuti, atau hal lain yang erat kaitannya dengan tindakan diskriminasi baik secara langsung dan tidak langsung. Salah satu bentuk intimidasi yang pernah terjadi di Desa Panggungharjo seperti tidak dicantumkan atau didaftarkan penyandang disabilitas sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK).

Aspek kemandirian menjadi parameter utama mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam prosesnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat lekat dengan mengupayakan hadirnya unsur-unsur keberdayaan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Selain itu, dapat keluar dari ketergantungan yang mengondisikan masyarakat terjebak dalam jeratan ketidakmampuan atau situasi kemiskinan dan keterbelakangan—dengan istilah lain berarti memandirikan masyarakat.²⁴ Penerapan strategi pemberdayaan dapat dilakukan dan dicapai melalui pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan.²⁵ Pendekatan utama dalam konsep atau strategi pemberdayaan ialah masyarakat dilibatkan tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi dilibatkan sebagai subjek dari upaya pembangunan terhadap

²⁴ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007).

²⁵ Aris Munandar, "Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Poetik* 4, no. 1 (2008): 151–62.

dirinya sendiri.

Dengan demikian, pemberdayaan setidaknya dilaksanakan dengan tiga pendekatan, antara lain: *Pertama*, upaya yang terarah. *Kedua*, program harus dilaksanakan atau diikutsertakan oleh masyarakat itu sendiri. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok. Pemberdayaan akan sangat sulit bila masyarakat miskin mengatasinya sendiri-sendiri. Sehingga unsur keterlibatan atau peningkatan partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan satu bentuk dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.²⁶ Program Pemberdayaan di Desa Panggungharjo menjadi salah satu yang terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Strategi Menciptakan Lingkungan Inklusif

Penelitian ini juga dianalisa menggunakan rancangan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT) yang merupakan penjabaran alternatif strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dalam melaksanakan pemberdayaan. Analisis SWOT disusun berdasarkan hubungan dan interaksi antara unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Umumnya strategi dirumuskan untuk memnfaatkan kekuatan dan kesempatan (S dan O) serta mengurangi atau meminimalisir ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisis diharapkan mampu membuahkan rencana jangka panjang walaupun analisa dicondongkan untuk menghasilkan rencana jangka pendek (*shortterm improvement plant*).

²⁶ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Tabel 1. Rumusan Strategi Pemberdayaan Berdasarkan Analisa SWOT

<p>Eksternal</p>	<p>Oportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat • Branding Desa sebagai desa wisata sekaligus desa inklusif yang menjadi daya Tarik wisatawan untuk datang 	<p>Threat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kepemimpinan pemerintahan desa atau BUMDesa
<p>Internal</p> <p>Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat penyandang disabilitas memiliki kemampuan organisasi dan terafiliasi dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta memiliki partisipasi yang tinggi • Terjalin integrasi dan komunikasi yang baik antara organisasi baik pemerintah desa, BUM Desa, dan para penyandang disabilitas 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan menggunakan fasilitasi dana desa, menetapkan anggaran khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas dengan melaksanakan pelatihan–pelatihan kerja untuk menguatkan potensi • Branding desa wisata yang turut memajukan perekonomian dengan melibatkan penyandang disabilitas pada program desa. • <i>Local Champion</i> penyandang disabilitas dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan desa 	<p>Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Champion</i> Kepala Desa selesai menjabat tetap dijadikan penasihat atau pembina dalam pemerintahan desa atau dalam komunitas penyandang disabilitas. • <i>Local Champion</i> penyandang disabilitas dilibatkan dalam rapat Musyawarah Desa dalam memilih pimpinan pemerintah desa. • <i>Local Champion</i> menduduki posisi kepemimpinan yang berpengaruh terhadap masyarakat: Kepala Desa dan ketua komunitas penyandang disabilitas

Weakness	Strategi W-O	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada keluarga yang malu memiliki anak penyandang disabilitas • Program pemberdayaan masih belum bisa mensejahterakan seluruh penyandang disabilitas • Beberapa penyandang disabilitas tidak semua memiliki potensi dalam kegiatan seni ataupun dalam pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan disabilitas perlu melibatkan keluarga dalam pelaksanaannya. • Seiring kemajuan desa, fasilitas pemberdayaan disabilitas perlu disusun dengan skema yang mampu mensejahterakan mereka • Pemberdayaan disabilitas tak hanya dalam ruang lingkup seni dikembangkan serta diberikan peluang untuk terlibat sesuai bakat dan potensi penyandang disabilitas setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dikeluarkan Peraturan desa untuk advokasi keberlangsungan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Tahap awal penetapan strategi analisis SWOT yang akan ditelaah mencakup faktor internal meliputi kelemahan (*Weakness*) dan kekuatan (*Strength*) sedangkan faktor eksternal mencakup tantangan (*Threat*) dan kesempatan (*Opportunity*)²⁷ yang dirumuskan berdasarkan hasil wawancara. Pertama, kekuatan (*strengths*) merupakan potensi kekuatan yang ada pada masyarakat penyandang disabilitas di desa Panggunharjo, antara lain: masyarakat penyandang disabilitas memiliki potensi menghasilkan karya seni dan aktif dalam kegiatan berkesenian (pertunjukan seni); masyarakat penyandang disabilitas memiliki kemampuan

²⁷ Rangkuti Freddy, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Jakarta: Gramedia, 2018).

organisasi dan terafiliasi dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta memiliki partisipasi yang tinggi; terjalin integrasi dan komunikasi yang baik antara organisasi baik pemerintah desa, BUM Desa, dan penyandang disabilitas; dan *local champion* penyandang disabilitas menduduki posisi kepemimpinan yang diakui dan berpengaruh terhadap masyarakat yaitu sebagai kepala desa dan ketua BUM Desa. Kedua, kelemahan (*weakness*) merupakan potensi kelemahan yang ada pada masyarakat penyandang disabilitas di desa Panggungharjo, antara lain: masih ada keluarga yang malu memiliki anak penyandang disabilitas; program pemberdayaan masih belum bisa mensejahterakan seluruh penyandang disabilitas; dan beberapa penyandang disabilitas tidak semua memiliki potensi dalam kegiatan seni ataupun dalam pekerjaan. Ketiga, kesempatan (*opportunity*) merupakan kondisi yang memberikan peluang pada masyarakat penyandang disabilitas di desa Panggungharjo, antara lain: fasilitasi dana desa (DD) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan branding desa sebagai salah satu desa wisata sekaligus desa inklusif yang ramai dikunjungi wisatawan. Keempat, ancaman (*threat*) merupakan kondisi yang memberikan ancaman pada masyarakat penyandang disabilitas di desa Panggungharjo, antara lain perubahan kepemimpinan pemerintahan desa atau BUM Desa.

Penutup

Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa Panggungharjo bersama dengan BUMDesa Panggung Lestari. Penyandang disabilitas memetakan kebutuhan mereka (*bottom-up*) namun segala masukan dan program diputuskan secara *top-down* oleh kepala desa. Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan juga oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Panggung Lestari dengan melibatkan mereka

sebagai staf atau pegawai unit kerja serta pelaku seni untuk wisata Kampoeng Matraman.

Pemberdayaan yang berlangsung mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat kerap berkolaborasi dengan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat penyandang disabilitas leluasa berinteraksi ataupun bermobilisasi tanpa takut terdiskriminasi dengan keterbatasannya. Selain itu, kegiatan pemberdayaan turut meningkatkan peningkatan kemandirian bagi diri mereka dengan adanya kesempatan berkarya dan berpenghasilan. Keberadaan *local champion* yang dijabat oleh Kepala Desa dan Ketua Komunitas Penyandang disabilitas menjadi kekuatan (*strength*) yang mendorong hadirnya pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu sendiri.

Proses pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek atau aktor utama dari pemberdayaan sehingga menimbulkan peluang untuk mengaktualisasikan diri dan potensi mereka. Hal ini menjadi satu pembelajaran bagi masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas layaknya masyarakat umum. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap disabilitas dalam pembangunan desa serta dalam meningkatkan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mencerminkan sasaran prioritas penggunaan dana desa.

Berdasarkan analisis SWOT, alternatif strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo dalam mengupayakan keberlangsungan pemberdayaan terhadap penyandang Disabilitas antara lain: (1) Dengan menggunakan fasilitasi dana desa, masyarakat penyandang disabilitas dikuatkan potensinya dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan; (2) Branding desa yang turut memajukan perekonomian desa diarahkan juga untuk

melibatkan penyandang disabilitas dalam program-programnya; (3) Local Champion penyandang disabilitas dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan desa dan kegiatan strategis lainnya; (4) Local Champion Kepala Desa selesai menjabat tetap dijadikan penasihat atau pembina dalam pemerintahan desa atau dalam komunitas penyandang disabilitas; (5) Pemberdayaan disabilitas perlu melibatkan keluarga dalam pelaksanaannya; (6) Seiring kemajuan desa, fasilitasi pemberdayaan disabilitas perlu disusun dengan skema keekonomian yang mampu; (7) Pemberdayaan disabilitas tak hanya dalam ruang lingkup seni dikembangkan serta diberikan peluang untuk terlibat sesuai bakat dan potensi penyandang disabilitas setempat; dan (8) Perlu dikeluarkan Peraturan Desa untuk advokasi keberlangsungan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Advokasi sosial bagi komunitas penyandang disabilitas tidak hanya berhenti pada satu kebijakan yang menghargai komunitas ini. Namun juga perlu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh komunitas penyandang disabilitas lebih responsif dan adaptif dengan kondisi mereka saat ini. Artinya, komunitas penyandang disabilitas secara utuh harus dilihat dalam ranah yang mampu dan berdaya dalam proses penyusunan reformulasi kebijakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat pedesaan harus juga menyadari bahwa komunitas gelandangan adalah kelompok yang dapat diberdayakan. Untuk itu, pandangan miring kepada kelompok ini harusnya sudah tidak ada lagi. Semoga studi ini dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana menghargai komunitas disabilitas.

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Arif, Ferdian. “Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM di Desa Pompaniki.” *Public Administration Journal* 2, no. 1 (2008): 60–66.
- BPS. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Edited by Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. Jakarta, 2018.
- Diana, Conyers. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press, 1991.
- Djohani, Rianisngsih. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: FPPM, 2008.
- Freddy, Rangkuti. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Hastuti, Kumala Dewi Rika, Putri Pramana Rezanti, and Sadaly Hariyanti. “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas.” Jakarta, 2019. <http://www.smeru.or.id/id/content/kendala-mewujudkan-pembangunan-inklusif-terhadap-penyandang-disabilitas>.
- Haven-Tang, Claire, and Eleri Jones. “Local Leadership for Rural Tourism Development: A Case Study of Adventa, Monmouthshire, UK.” *Tourism Management Perspectives* 4 (2012): 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.04.006>.
- Hikmawati, Eny, and Chatarina Rusmiyati. “Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat.” *Sosio Informa* 16, no. 01 (2011): 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.41>.
- Human Right Watch. “Hidup di Neraka.” Chicago, 2016.
- Maftuhin, Arif. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas.” *Inklusi Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–62. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.
- Munandar, Aris. “Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Poelitik* 4, no. 1 (2008): 151–62.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Purinami, Geminastiti, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana. “Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja.” *Focus* :

Jurnal Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>.

- Sri, Moertiningsih Adioetomo, Mont Daniel, and Irwanto. "Persons With Disabilities Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies." *Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia in Collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)*. Jakarta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2010.
- Suyatno, Hempri, and Suparjan. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Thohari, Slamet; Lintang Sari, Alies Poetri; Rahajeng, Unita Werdi; Mahalli; Rizky, Ulfa Fatmala. "Laporan Penelitian: Pemetaan Kesenian dan Disabilitas di Indonesia." *Pusat Studi Layanan dan Disabilitas Universitas Brawijaya & British Council Indonesia*, 2017, 1–283.
- Thohari, Slamet. "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang." *Indonesian Journal of Disability Studies* 1, no. 1 (2014): 27–37.
- Winarni, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.
- . *Tantangan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Azzagrafika, 2015.
- Xu, Keshuai, Jin Zhang, and Fengjun Tian. "Community Leadership in Rural Tourism Development: A Tale of Two Ancient Chinese Villages." *Sustainability (Switzerland)* 9, no. 12 (2017): 2344. <https://doi.org/10.3390/su9122344>.
- Zamroni, Sunaji. "Desa Membangun Tanpa Meninggalkan Kelompok Pinggiran." *Institute for Research and Empowerment (IRE)* 2, no. 1 (2016): 1–10.